

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan adalah ketersediaannya akses bagi para masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Inklusi keuangan dapat juga didefinisikan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi (Sarma, 2012). Lalu, untuk dapat mengukur tingkat inklusi keuangan, salah satu alat yang dapat digunakan yaitu indeks inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan adalah ukuran untuk tingkat inklusi keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di 34 provinsi yang ada di Indonesia (Anissa, 2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan hasil indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Angka ini mengalami kenaikan dari hasil survei yang dilakukan OJK pada tahun 2016 yang hanya sebesar 67,8% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Survei yang dilakukan OJK ini dipublikasikan ke masyarakat Indonesia dalam 3 tahun sekali. Survei selanjutnya yang dipublikasikan melalui laman resmi OJK tahun selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan yang tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dengan nilai 94,76%. Provinsi yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan di tahun 2019

tertinggi kedua yaitu provinsi Sumatera Utara dengan 93,98%. Lalu di urutan ketiga adalah provinsi Bali dengan nilai 92,91%.

Tabel 1.1

Persentase Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi

NO	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan (persen)	
		2019	2022
1	Aceh	86.09	89.87
2	Sumatera Utara	93.98	95.58
3	Sumatera Barat	66.75	76.88
4	Riau	86.39	85.19
5	Jambi	64.83	85.19
6	Sumatera Selatan	85.08	88.57
7	Bengkulu	85.56	88.05
8	Lampung	61.94	74.81
9	Kep. Bangka Belitung	64.57	79.84
10	Kep. Riau	92.13	87.01
11	DKI Jakarta	94.76	96.62
12	Jawa Barat	88.48	88.31
13	Jawa Tengah	65.71	85.97
14	Di Yogyakarta	76.12	82.08
15	Jawa Timur	87.96	92.99
16	Banten	84.29	85.71
17	Bali	92.91	92.21
18	Nusa Tenggara Barat	62.73	82.34
19	Nusa Tenggara Timur	60.63	85.97
20	Kalimantan Barat	75.33	84.16
21	Kalimantan Tengah	74.80	81.30
22	Kalimantan Selatan	74.54	81.56
23	Kalimantan Timur	92.39	93.25
24	Kalimantan Utara	65.09	91.69
25	Sulawesi Utara	83.99	86.23
26	Sulawesi Tengah	84.51	78.44
27	Sulawesi Selatan	86.91	88.57
28	Sulawesi Tenggara	75.07	84.42
29	Gorontalo	60.89	88.57
30	Sulawesi Barat	62.99	70.39
31	Maluku	65.62	78.70
32	Maluku Utara	75.85	81.04
33	Papua Barat	59.84	81.30
34	Papua	60.89	76.36

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Di tahun 2022 provinsi dengan nilai indeks yang paling tinggi juga masih provinsi DKI Jakarta dengan nilai 96,62%. Di urutan kedua diikuti oleh provinsi Sumatera Utara dengan nilai 95,58%. Lalu di urutan yang ketiga ada provinsi Kalimantan Timur yang nilai indeks inklusi keuangannya naik menjadi 93,25%.

Pandemi covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah terpaksa menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya menanggulangi penyebarannya. Adanya kebijakan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktifitas masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Pandemi covid-19 ini juga mempengaruhi angka indeks inklusi keuangan di Indonesia. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% yang akhirnya pada tahun 2020 angka dimana pada saat itu Indonesia sedang dalam masa pandemi, turun menjadi 2,97% (Akhmad, 2022). Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu daya konsumtif masyarakat yang melemah dan juga terjadinya PHK besar-besaran di banyak perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi.

Internet di era globalisasi sekarang ini menjadi salah satu hal yang penting kegunaannya bagi negara Indonesia. Internet dapat digunakan untuk sosial media, bekerja, komunikasi, perekonomian, dan lain-lain semua sudah dapat diakses melalui internet. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses layanan jasa yang ditawarkan perbankan terlebih lagi pada sektor inklusi keuangan. Dengan jasa keuangan yang sulit diakses terutama oleh penduduk

yang tinggal di desa akhirnya mereka memilih untuk meminjam di lembaga keuangan informal (Anggraeni, 2009). Internet dapat mengatasi masalah tersebut karena mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan layanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan yang salah satunya yaitu inklusi keuangan.

Keunggulan dalam mengakses inklusi keuangan melalui internet juga dapat dirasakan saat Indonesia sedang dalam masa pandemi covid-19. Karena kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah demi menanggulangi penyebaran covid-19 membuat banyak masyarakat yang tidak mengetahui kemudahan mengakses inklusi keuangan lewat internet meningkat. Pada tahun 2019, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Indonesia memiliki angka sebesar 47,69%. Di masa pandemi covid-19 yang masih berjalan di Indonesia yaitu pada tahun 2021, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 62,1% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut Tabel 1.2, provinsi yang memiliki persentase tertinggi pada tahun 2019 yaitu provinsi DKI Jakarta dengan 73,46%. Provinsi dengan nilai tertinggi kedua adalah provinsi Kepulauan Riau dengan angka 65,02%. Lalu, di urutan ketiga yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 61,73%. Di urutan keempat yaitu provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 59,12% yang diikuti oleh provinsi Banten di urutan kelima dengan 56,25%. Pada tahun 2021, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan nilai persentase tertinggi yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 menjadi 85,55%. Di urutan kedua ada provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 menjadi 81,03%. Lalu di urutan ketiga dan keempat ada provinsi Kalimantan Timur dan Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan nilai persentase sebesar 74,47% dan 74%. Dan di urutan kelima diikuti oleh provinsi Kalimantan Utara dengan 69,26%.

Tabel 1.2

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir

NO	Provinsi	Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir (persen)	
		2019	2021
1	Aceh	35.60	49.23
2	Sumatera Utara	41.38	59.17
3	Sumatera Barat	41.15	58.14
4	Riau	44.97	62.83
5	Jambi	42.68	56.07
6	Sumatera Selatan	38.14	56.89
7	Bengkulu	40.72	54.97
8	Lampung	40.17	59.94
9	Kep. Bangka Belitung	45.85	60.94
10	Kep. Riau	65.02	81.03
11	DKI Jakarta	73.46	85.55
12	Jawa Barat	53.94	68.37
13	Jawa Tengah	47.74	62.20
14	DI Yogyakarta	61.73	74.00
15	Jawa Timur	47.10	59.34
16	Banten	56.25	67.14
17	Bali	54.08	67.75
18	Nusa Tenggara Barat	39.16	52.96
19	Nusa Tenggara Timur	26.29	43.14
20	Kalimantan Barat	38.38	54.80
21	Kalimantan Tengah	46.73	59.97
22	Kalimantan Selatan	50.37	66.01
23	Kalimantan Timur	59.12	74.47
24	Kalimantan Utara	54.30	69.26
25	Sulawesi Utara	46.73	59.73
26	Sulawesi Tengah	35.52	50.15
27	Sulawesi Selatan	43.91	59.69
28	Sulawesi Tenggara	41.92	57.21
29	Gorontalo	41.78	56.03
30	Sulawesi Barat	31.26	48.73
31	Maluku	33.89	49.74
32	Maluku Utara	29.13	42.68
33	Papua Barat	43.46	54.61
34	Papua	21.70	26.49

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Telepon seluler di Indonesia merupakan salah satu alat yang hampir pasti dimiliki oleh masing-masing individu. Telepon seluler itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, dan dapat dibawa kemana-mana tanpa perlu disambungkan lagi dengan jaringan telepon menggunakan kabel (Siagian, 2022). Telepon seluler ini juga dapat digunakan untuk mengakses inklusi keuangan. Mengakses inklusi keuangan melalui telepon seluler ini mempermudah masyarakat karena dapat diakses darimana saja tanpa mengharuskan masyarakat mendatangi bank secara langsung. Kelebihan ini sangat berguna pada masa pandemi covid-19 yang melarang masyarakat untuk datang langsung ke bank.

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, provinsi yang memiliki nilai persentase tertinggi di tahun 2019 adalah provinsi DKI Jakarta dengan nilai 78,42%. Di urutan kedua dan ketiga ada provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau dengan nilai persentase sebesar 76,88% dan 76,39%. Lalu ada provinsi Kalimantan Utara di urutan keempat dengan 74,32% yang diikuti oleh Kalimantan Tengah di urutan kelima dengan 70,28%. Pada tahun 2021, provinsi dengan nilai persentase tertinggi masih dipegang oleh provinsi DKI Jakarta juga dengan nilai persentase sebesar 81,83%. Untuk urutan kedua dan ketiga juga masih dengan provinsi yang sama yaitu Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau dengan 81,80% dan 80,5%. Lalu di urutan keempat dan kelima ada provinsi Kalimantan Utara dan Bali dengan nilai 76,02% dan 71,65%.

Tabel 1.3

Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler

NO	Provinsi	Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (persen)	
		2019	2021
1	Aceh	57.75	61.20
2	Sumatera Utara	60.66	65.05
3	Sumatera Barat	62.62	65.34
4	Riau	67.29	70.57
5	Jambi	64.75	67.32
6	Sumatera Selatan	60.70	64.53
7	Bengkulu	61.18	64.34
8	Lampung	61.54	63.83
9	Kep. Bangka Belitung	67.77	68.22
10	Kep. Riau	76.39	80.51
11	DKI Jakarta	78.42	81.83
12	Jawa Barat	66.24	67.83
13	Jawa Tengah	61.66	62.76
14	DI Yogyakarta	67.66	69.81
15	Jawa Timur	62.16	62.99
16	Banten	65.21	68.20
17	Bali	69.61	71.65
18	Nusa Tenggara Barat	57.10	59.16
19	Nusa Tenggara Timur	45.01	51.92
20	Kalimantan Barat	58.57	62.39
21	Kalimantan Tengah	70.28	71.62
22	Kalimantan Selatan	68.97	69.49
23	Kalimantan Timur	76.88	81.10
24	Kalimantan Utara	74.32	76.02
25	Sulawesi Utara	67.90	70.32
26	Sulawesi Tengah	57.68	61.10
27	Sulawesi Selatan	65.07	69.13
28	Sulawesi Tenggara	62.68	68.22
29	Gorontalo	60.36	64.64
30	Sulawesi Barat	52.18	59.51
31	Maluku	56.96	62.41
32	Maluku Utara	53.69	59.08
33	Papua Barat	66.49	68.11
34	Papua	38.50	38.94

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling kerja sama dan dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis (Romli, 2018). Dengan pemberlakuan PSBB yang membuat banyak terjadinya

PHK mengakibatkan persentase penduduk yang menggunakan komputer di Indonesia menurun pada saat pandemi covid-19 yang pada tahun 2019 sebesar 14,47% menjadi 12,07% di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 1.4

Persentase Penduduk yang Menggunakan Komputer

NO	Provinsi	Penduduk yang Menggunakan Komputer (persen)	
		2019	2021
1	Aceh	11.64	10.39
2	Sumatera Utara	14.17	10.53
3	Sumatera Barat	17.00	14.18
4	Riau	14.50	11.19
5	Jambi	12.20	11.21
6	Sumatera Selatan	11.10	8.54
7	Bengkulu	14.89	11.75
8	Lampung	9.94	7.24
9	Kep. Bangka Belitung	12.01	10.93
10	Kep. Riau	20.72	21.44
11	DKI Jakarta	23.51	25.34
12	Jawa Barat	14.52	12.98
13	Jawa Tengah	13.17	9.83
14	DI Yogyakarta	23.35	22.52
15	Jawa Timur	14.22	10.72
16	Banten	15.27	12.30
17	Bali	18.62	14.58
18	Nusa Tenggara Barat	12.03	10.16
19	Nusa Tenggara Timur	11.39	10.93
20	Kalimantan Barat	10.45	8.52
21	Kalimantan Tengah	13.58	11.09
22	Kalimantan Selatan	17.35	11.80
23	Kalimantan Timur	19.42	17.89
24	Kalimantan Utara	18.02	14.73
25	Sulawesi Utara	14.27	12.53
26	Sulawesi Tengah	13.61	10.74
27	Sulawesi Selatan	15.41	13.63
28	Sulawesi Tenggara	15.80	12.08
29	Gorontalo	16.46	12.63
30	Sulawesi Barat	12.30	9.65
31	Maluku	13.78	12.85
32	Maluku Utara	11.26	9.34
33	Papua Barat	14.04	11.97
34	Papua	8.20	6.58

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Menurut Tabel 1.4, provinsi dengan nilai persentase tertinggi tahun 2019 adalah DKI Jakarta dengan nilai 23,51%. Di urutan kedua ada provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 23,35%. Lalu di urutan ketiga ada provinsi Kepulauan Riau dengan 20,72%. Di urutan keempat dan kelima ada provinsi Kalimantan Timur dan Bali dengan nilai 19,42% dan 18,62%. Pada tahun 2021, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan nilai persentase tertinggi yang mengalami kenaikan menjadi 25,34%. DI Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 22,52% tetapi tetap menjadi provinsi yang memiliki nilai tertinggi urutan kedua pada tahun 2021. Lalu di urutan ketiga dan keempat ada provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur dengan 21,44% dan 17,89%. Di urutan kelima yaitu provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kenaikan menjadi 14,73%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu penanda ekonomi makro yang dapat dikategorikan sebagai keadaan ekonomi wilayah secara konsisten (Rohaya & Andriyani, 2022). Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur PDRB suatu wilayah yaitu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Laju pertumbuhan PDRB Indonesia pada tahun 2019, sebelum adanya masa pandemi, mencapai angka sebesar 5,02%. Setelah Indonesia hidup berdampingan dengan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,70% (Badan Pusat Statistik, 2021). Penurunan ini dikarenakan banyak aktifitas ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk bertemu secara langsung terhambat karena adanya pemberlakuan PSBB.

Tabel 1.5

Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

NO	Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (persen)	
		2019	2021
1	Aceh	4.14	2.79
2	Sumatera Utara	5.22	2.61
3	Sumatera Barat	5.01	3.29
4	Riau	2.81	3.36
5	Jambi	4.35	3.66
6	Sumatera Selatan	5.69	3.58
7	Bengkulu	4.94	3.24
8	Lampung	5.26	2.79
9	Kep. Bangka Belitung	3.32	5.05
10	Kep. Riau	4.83	3.43
11	DKI Jakarta	5.82	3.56
12	Jawa Barat	5.02	3.74
13	Jawa Tengah	5.36	3.32
14	DI Yogyakarta	6.59	5.53
15	Jawa Timur	5.53	3.57
16	Banten	5.26	4.44
17	Bali	5.60	-2.47
18	Nusa Tenggara Barat	3.90	2.30
19	Nusa Tenggara Timur	5.25	2.51
20	Kalimantan Barat	5.09	4.78
21	Kalimantan Tengah	6.12	3.40
22	Kalimantan Selatan	4.09	3.48
23	Kalimantan Timur	4.70	2.48
24	Kalimantan Utara	6.89	3.98
25	Sulawesi Utara	5.65	4.16
26	Sulawesi Tengah	8.83	11.70
27	Sulawesi Selatan	6.91	4.65
28	Sulawesi Tenggara	6.50	4.10
29	Gorontalo	6.40	2.41
30	Sulawesi Barat	5.56	2.56
31	Maluku	5.41	3.04
32	Maluku Utara	6.25	16.40
33	Papua Barat	2.66	-0.51
34	Papua	-15.74	15.11

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan Tabel 1.5, provinsi dengan persentase laju pertumbuhan domestik regional bruto tertinggi pada tahun 2019 yaitu provinsi Sulawesi Tengah dengan 8,83%. Di urutan kedua ada provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 6,91%.

Lalu urutan ketiga yaitu provinsi Kalimantan Utara dengan 6,89%. Provinsi di urutan keempat dan kelima selanjutnya yaitu provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara dengan 6,59% dan 6,50%. Di tahun 2021, provinsi dengan persentase laju pertumbuhan domestik regional bruto tertinggi yaitu provinsi Maluku Utara dengan 16,40%. Kemudian di urutan kedua ada provinsi Papua dengan 15,11%. Lalu di urutan ketiga ada provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 11,70%. Di urutan keempat dan kelima yaitu provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat yang masing-masing memiliki nilai sebesar 5,05% dan 4,78%.

Dengan latar belakang penelitian yang sudah dicantumkan, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran akses internet, kepemilikan telepon seluler, penggunaan komputer, dan juga laju pertumbuhan PDRB terhadap tingkal indeks inklusi keuangan di 34 provinsi yang ada di Indonesia sebelum masa pandemi covid-19 yaitu di tahun 2019 dan juga pada masa pandemi covid-19 sedang berlangsung yaitu tahun 2022. Diduga bahwa akses internet, kepemilikan telepon seluler, penggunaan komputer, dan juga laju pertumbuhan PDRB memiliki hubungan positif terhadap indek inklusi keuangan di Indonesia pada masa sebelum pandemi dan juga pada saat pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir terhadap indeks inklusi keuangan.
2. Bagaimana pengaruh proporsi penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler terhadap indeks inklusi keuangan.
3. Bagaimana pengaruh proporsi penduduk yang menggunakan komputer terhadap indeks inklusi keuangan.
4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap indeks inklusi keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir terhadap indeks inklusi keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler terhadap indeks inklusi keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi penduduk yang menggunakan komputer terhadap indeks inklusi keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap indeks inklusi keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang inklusi keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran supaya menjadi referensi dalam meneliti inklusi keuangan.

1.5 Hipotesis

Menurut rumusan masalah yang di ada di atas, hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir memiliki pengaruh positif terhadap indeks inklusi keuangan.
2. Diduga proporsi penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler memiliki pengaruh positif terhadap indeks inklusi keuangan.
3. Diduga proporsi penduduk yang menggunakan komputer memiliki pengaruh positif terhadap indeks inklusi keuangan.
4. Diduga laju pertumbuhan domestik regional bruto memiliki pengaruh positif terhadap indeks inklusi keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang memiliki kaitan dengan inklusi keuangan, internet, telepon seluler dan komputer yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian data yang akan digunakan dalam penelitian ini, sumber data penelitian, definisi operasional dari variabel-variabel penelitian, alat analisis yang digunakan dalam penelitian dan model data yang diteliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan penelitian dalam bentuk interpretasi dari hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan singkat mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berguna untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang ditujukan kepada pengambil keputusan atau pihak terkait.